

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kecurangan Pelaporan Keuangan

1. Pengertian Kecurangan (Fraud)

Secara harfiah kecurangan didefinisikan sebagai *fraud*. Salah satu bentuk *fraud* yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah kecurangan pelaporan keuangan. Menurut Tuanakotta (2013:28) kecurangan (*fraud*) dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kesengajaan, niat jahat, penipuan (*deception*), menyembunyian (*concealment*) dan penyalahgunaan kepercayaan (*violation of trust*). Perbuatan tersebut bertujuan untuk mengambil keuntungan haram (*illegal advantage*) yang bisa berupa uang, barang atau harta yang lain.

Tunggal (2012:189) menjelaskan bahwa kecurangan (*fraud*) diartikan sebagai penipuan di bidang keuangan yang disengaja, dimaksudkan untuk mengambil aset dan hak orang maupun pihak lain. Kecurangan (*fraud*) umumnya terjadi karena adanya tekanan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian kecurangan (*fraud*) di atas dapat disimpulkan bahwa kecurangan (*fraud*) merupakan serangkaian tindakan

melanggar hukum yang dilakukan oleh individu atau organisasi secara sengaja untuk menipu, menyembunyikan dan menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tindakan tersebut dapat menyebabkan kerugian secara langsung ataupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang terkait.

2. Teori Segitiga Kecurangan (Fraud Triangle Theory)

Berdasarkan dalam teori segitiga kecurangan (*fraud triangle theory*) terdapat tiga faktor seseorang melakukan kecurangan. Menurut Tuanakotta (2007:105) ketiga faktor tersebut adalah karena adanya kesempatan (*Opportunity*), tekanan (*Pressure*) dan rasionalisasi (*Rationalization*).

a. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan adalah situasi yang membuka peluang bagi manajemen atau pegawai yang memungkinkan terjadinya kecurangan (Tunggal, 2011:2). Kesempatan atau peluang dapat terjadi karena lemahnya pengendalian internal, pengawasan manajemen yang kurang baik atau tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan, sehingga pelaku kecurangan percaya bahwa aktivitas mereka tidak terdeteksi (Tuanakotta, 2007:106).

Diantara ketiga elemen teori segitiga kecurangan (*fraud triangle theory*), kesempatan (*opportunity*) inilah yang mempunyai kontrol paling atas. Oleh karena itu, dalam mendeteksi adanya

aktifitas kecurangan maka perusahaan atau instansi perlu membangun sebuah proses, prosedur dan kontrol yang efektif.

b. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan adalah dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan (Tunggal, 2011:2). Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi dan lain-lain, termasuk hal non keuangan ataupun keuangan. Tuanakotta (2007:107) mengungkapkan dari penelitian Cressey dalam penelitian Cressey bahwa status sosial juga ikut menjadi tekanan seseorang dalam melakukan kecurangan (*fraud*).

c. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi merupakan bagian *fraud triangle* yang sulit diukur. Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya kecurangan dimana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya. Rasionalisasi adalah sikap, karakter atau nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan kecurangan dan tindakan tidak jujur, atau orang-orang yang berada dalam keadaan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalkan (membenarkan) tindakan-tindakan yang tidak jujur (Tunggal, 2011:2).

3. Klasifikasi Kecurangan (Fraud)

Secara skematis, *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE-2006)* dalam Tuanakotta (2007:96) menggambarkan kecurangan (*fraud*) dalam empat kelompok besar yaitu:

a. Kecurangan Pelaporan (*Fraudulent Statement*)

Jenis kecurangan ini sangat dikenal oleh para auditor yang melakukan *general* audit. Kecurangan pelaporan meliputi tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh pimpinan suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi laporan keuangan yang sebenarnya dengan melakukan manipulasi terhadap catatan dan transaksi keuangan tersebut.

b. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset adalah sebuah bentuk kecurangan atas hilangnya aset suatu entitas. Penyalahgunaan aset biasanya terkait dengan pencurian oknum-oknum tertentu seperti pegawai dan pihak-pihak internal di dalam suatu entitas. Peluang untuk terjadinya kecurangan jenis ini berkaitan erat dengan lemahnya sistem pengendalian internal, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan keselamatan aset (*safeguarding of assets*).

c. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi secara umum didefinisikan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi terdiri atas pertentangan kepentingan, penyuapan, hadiah tidak sah dan pemerasan ekonomi.

d. Kecurangan Berkaitan dengan Komputer (*Computer Fraud*)

Kajahatan berkaitan dengan komputer meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut:

- 1) Menambah, menghilangkan atau mengubah masukan serta memasukkan data palsu.
- 2) Salah memposting atau memposting sebagian transaksi saja.
- 3) Merusak program, misalnya mengambil uang dari banyak rekening dalam jumlah kecil-kecil.
- 4) Mengubah dan menghilangkan master file.
- 5) Melakukan sabotase
- 6) Melakukan pengamatan elektronik dari data pada saat dikirim.

4. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk memberikan informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan (Mahmudi, 2011:143). Laporan keuangan selain sebagai alat untuk memberikan informasi keuangan juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas dan evaluasi kinerja khususnya kinerja keuangan.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum agar laporan keuangan tersebut dapat

dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan entitas yang jelas.

Pengertian laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2015:1) adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Pengertian laporan keuangan lainnya menurut Munawir (2010:2) adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu entitas dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas suatu entitas tersebut.

Berdasarkan dari lingkup pemerintahan, laporan keuangan daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan dari hasil aktivitas tertentu. Laporan digunakan terutama untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna dan berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh

suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan PP RI Nomor 71 Tahun 2010 adalah menyajikan suatu informasi yang bermanfaat bagi para penggunanya dalam menilai akuntabilitas entitas pelaporan dan pengambilan keputusan, baik keputusan dalam hal ekonomi, sosial maupun politik. Adapun beberapa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang ada di lingkup sektor publik. Menurut PP RI Nomor 71 Tahun 2010 bahwa laporan keuangan tersebut terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Laporan Arus Kas (LAK)
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam bentuk laporan yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan dan dapat diandalkan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan baik di sektor swasta maupun sektor publik selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan evaluasi kinerja manajerial.

5. Pengertian Kecurangan Pelaporan Keuangan

Kecurangan pelaporan keuangan biasanya dilakukan oleh manajemen untuk kepentingan organisasi. Kecurangan pelaporan keuangan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atas laporan keuangan dalam suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan perekayasaan keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan (Tuanakotta, 2007:105).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2001:316) menjelaskan tentang kecurangan pelaporan keuangan sebagai:

1. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam laporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan.
2. Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat pelaporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU) di Indonesia.

Menurut William (1996:67) dalam Tiro (2014) kecurangan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) terdiri dari tindakan-tindakan seperti:

- 1.) Manipulasi, pemalsuan atau perubahan catatan atau dokumen pendukung yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan.
- 2.) Representasi yang salah atau penghapusan yang disengaja atas peristiwa-peristiwa, transaksi-transaksi atau informasi signifikan lainnya yang ada dalam laporan keuangan.
- 3.) Salah penerapan yang disengaja atas prinsip-prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi dan cara penyajian atau pengungkapan.

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas, dapat diketahui bahwa kecurangan dalam laporan keuangan terdiri dari tindakan memanipulasi, memalsukan catatan akuntansi, menghapus secara sengaja data-data keuangan dan informasi yang ada di laporan keuangan, sehingga akan menyajikan laporan keuangan yang tidak sebenarnya dan merugikan pihak lain secara langsung atau tidak langsung.

2.1.2 Pengendalian Internal

1. Pengertian Pengendalian Internal

Menurut IAI (2001:319) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

- a. Keandalan pelaporan keuangan
- b. Efektivitas dan efisiensi operasi

c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Pengendalian internal merupakan representatif dari keseluruhan kegiatan di dalam organisasi yang harus dilaksanakan, dimana proses yang dijalankan oleh dewan komisaris ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku (Tunggal, 2011:3). Pengendalian internal yang kuat akan mampu menurunkan tingkat kecurangan pelaporan keuangan. Sebaliknya, jika pengendalian internalnya lemah maka kecurangan pelaporan keuangan akan semakin besar.

Pengertian pengendalian internal menurut COSO (*The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission's*) (2013:3) adalah proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen tentang reliabilitas laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal sangat diperlukan oleh suatu lembaga sehingga hal ini harus dilaksanakan secara konsisten untuk mencapai tujuan lembaga. Pengendalian internal harus dilaksanakan sebaik mungkin untuk mencegah dan menghindari terjadinya kesalahan, kecurangan dan penyelewengan.

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses yang

komprehensif yang dipengaruhi oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai sebagai pedoman untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum. Jadi, pengendalian internal berguna untuk menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan serta bagaimana cara menilai kinerja perusahaan atau instansi dan manajemen. Pengendalian internal dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan atau instansi.

2. Komponen-komponen Pengendalian Internal

Pengendalian internal meliputi lima kategori yang dirancang untuk diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan jaminan bahwa sasaran hasil pengendalian internal terpenuhi. Komponen tersebut menurut COSO (*The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission's*) dalam Bastian (2001:52) yaitu:

a. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal. Lingkungan pengendalian menetapkan suatu corak organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya.

b. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko adalah mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang relevan dengan pencapaian tujuan, membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Karena kondisi

ekonomi, industri, regulasi dan operasi akan terus berubah, diperlukan mekanisme untuk mengidentifikasi dan menangani risiko khusus yang terkait dengan perubahan.

c. *Aktivitas Pengendalian (Control Activities)*

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen dilaksanakan dan memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk mengatasi risiko agar pencapaian tujuan organisasi terwujud. Aktivitas pengendalian mencakup berbagai kegiatan yang beragam seperti persetujuan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, review dari kinerja operasi, keamanan aset dan pemisahan tugas.

d. *Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)*

Informasi terkait harus diidentifikasi, ditangkap dan dikomunikasikan dalam bentuk dan kerangka waktu yang memungkinkan orang untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. Informasi disajikan dalam bentuk suatu sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. Komunikasi yang efektif juga harus terjadi dalam arti luas, mengalir ke bawah terus ke puncak organisasi. Pihak-pihak yang terkait harus memahami peran mereka sendiri dalam sistem pengendalian internal serta bagaimana kegiatan individu berhubungan dengan pekerjaan orang lain.

e. Pemantauan (*Monitoring*)

Sistem pengendalian internal perlu dipantau, dengan sebuah proses yang menilai kualitas kinerja sistem dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat ditindaklanjuti. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal, diperlukan pengawasan intern dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Kelima komponen tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga dapat memberikan kinerja sistem yang terintegrasi dan dapat merespon perubahan kondisi secara dinamis. Sistem pengendalian internal terjalin dengan aktifitas operasional entitas, dan akan lebih efektif apabila pengendalian dibangun ke dalam infrastruktur untuk menjadi bagian yang paling esensial dari perusahaan atau organisasi.

3. Tujuan Pengendalian Internal

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan di atas, maka tujuan pengendalian internal menurut Bastian (2001:54) adalah:

- a. Untuk melindungi harta atau aktiva organisasi dan pencatatan pembukuannya.

Aktiva organisasi sektor publik bisa dicuri, dirusak atau disalahgunakan secara sengaja atau tidak disengaja. Demikian juga untuk aktiva tidak nyata, seperti dokumen penting, surat berharga, dan catatan keuangan. Sistem pengendalian internal dibentuk untuk

mencegah atau menemukan aktiva yang hilang dan catatan pembukuan pada saat yang tepat.

b. Mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi.

Manajemen harus memiliki data akuntansi yang dapat diuji kecermatannya untuk melaksanakan operasi. Sistem pengendalian internal dapat mencegah dan menemukan kesalahan pada saat yang tepat.

c. Meningkatkan efisiensi operasi.

Pengendalian dalam organisasi, ditujukan untuk menghindari pekerjaan berganda yang tidak perlu dan mencegah pemborosan terhadap semua aspek usaha termasuk pencegahan terhadap penggunaan sumber dana yang tidak efisien.

d. Mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Manajemen menyusun prosedur dan peraturan untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem pengendalian internal memberikan jaminan bahwa prosedur dan peraturan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan.

2.1.3 Asimetri Informasi

Asimetri informasi merupakan pihak yang berkaitan dengan organisasi atau entitas yang tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan kinerja operasional entitas secara keseluruhan, dimana pihak tertentu mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan

pihak lain yang berkepentingan (Hanafi, 2004:314). Pihak yang dimaksud tersebut adalah yang terjadi antara bawahan (*agen*) dengan pimpinan (*principal*), dimana bawahan (*agen*) biasanya mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pimpinan (*principal*). Karena itu, bisa dikatakan terjadi asimetri informasi antara pimpinan dan bawahan.

Sedangkan menurut Kusumastuti (2012) Asimetri informasi merupakan suatu kondisi atau situasi dimana ada ketidakseimbangan perolehan antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi (*preparer*) dengan pihak investor atau *stakeholder* pada umumnya sebagai pengguna informasi (*user*). Adanya asimetri informasi, memungkinkan adanya konflik yang terjadi antara pimpinan dan bawahan untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri.

Menurut Najahningrum (2013), asimetri informasi merupakan kesenjangan informasi yang terjadi antara pihak pengguna dengan pihak pengelola dana, sehingga akan menimbulkan peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan kecurangan. Demikian pula apabila terjadi asimetri informasi, bawahan bisa membuat bias atau memanipulasi laporan keuangan sehingga dapat memperbaiki kompensasi dan reputasi, serta rasio-rasio keuangannya.

Dalam penelitian ini, asimetri informasi yang dimaksud adalah asimetri informasi yang terjadi antara OPD (Organisasi Perangkat Daerah) selaku *agen* dan Bupati sebagai *principal*. Untuk mengetahui adanya tindakan kecurangan akuntansi yang terjadi, pada entitas publik atau

pemerintahan, auditor internal adalah pakar dalam mendesain dan mengelola pengendalian internal. Auditor internal bertanggungjawab untuk menilai kecukupan dan keefektifan dari masing-masing sistem pengendalian yang memberikan jaminan kualitas dan integritas dari proses pelaporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi merupakan faktor yang mempengaruhi kecurangan pelaporan keuangan. Asimetri informasi adalah tidak adanya keselarasan atau keseimbangan informasi antara pihak yang membutuhkan informasi dengan pihak yang memberikan informasi mengenai laporan keuangan. Dalam hal ini, laporan keuangan yang diberikan telah dimanipulasi dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga pimpinan tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja bawahan. Sebaliknya bawahan mengetahui informasi yang lebih banyak mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan organisasi secara keseluruhan.

2.1.4Kesesuaian Kompensasi

1. Pengertian Kompensasi

Menurut Rivai (2010:741) kompensasi merupakan sesuatu yang diterima oleh pegawai atau karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada intansi atau perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

(MSDM) yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian.

Kompensasi menurut Hasibuan (2002:117) adalah semua pendapatan yang berbentuk uang maupun barang baik secara langsung atau tidak langsung yang diterima oleh pegawai atau karyawan atas imbalan jasa yang diberikan kepada sebuah instansi atau perusahaan. Bagi pegawai atau karyawan, kompensasi faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan, sedangkan bagi organisasi, kompensasi merupakan komponen biaya yang mempengaruhi tingkat efisiensi dan profitabilitas.

Kesesuaian kompensasi berpotensi sebagai salah satu sarana penting dalam membentuk dan mempengaruhi motivasi kerja. Hariandja (2005:244) mengemukakan bahwa kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan di organisasi dalam bentuk uang atau lainnya, yang dapat berupa gaji upah, bonus, insentif, tunjangan hari raya, uang makan, uang cuti, dan lain-lain. Dengan kata lain seorang pegawai yang bekerja pada sebuah entitas diharapkan akan mendapatkan kompensasi yang sesuai.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, tampak para ahli mengemukakan pengertian kompensasi yang beragam meskipun pada dasarnya tidak ada perbedaan yang mencolok, namun tetap memiliki arti dan maksud yang sama. Berdasarkan dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kompensasi adalah semua bentuk imbalan yang diberikan kepada pegawai atau karyawan sebagai timbal

balik dari pekerjaan mereka. Kompensasi bisa juga diartikan sebagai nilai atau *value* yang diterima oleh pegawai atau karyawan sesuai dengan apa yang diberikannya kepada organisasi dengan melihat hasil dari penghitungan kinerja pegawai atau karyawan tersebut berdasarkan nilai standar yang ditetapkan.

Kompensasi seseorang di dalam entitas pemerintahan, ditentukan dari berapa lama mereka bekerja dan golongan. Adapun mereka yang bekerja di bidang keuangan akan mendapatkan tambahan imbalan yang merupakan penghargaan atas tanggung jawab pekerjaan yang mereka emban. Namun, semakin tinggi imbalan yang mereka peroleh maka kebutuhan, tuntutan dan gaya hidup seseorang akan semakin tinggi. Dengan demikian individu tersebut akan melakukan berbagai cara untuk mendapat imbalan yang lebih dan lebih untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga kecenderungan untuk melakukan kecurangan sangat memungkinkan mereka yang bekerja di bagian keuangan (Ahriati, 2015).

2. Bentuk-bentuk Kompensasi

Menurut Rivai (2004:741) kompensasi yang diberikan kepada pegawai atau karyawan terdiri dalam dua bentuk, yaitu:

a. Kompensasi yang bersifat keuangan (*financial*)

Bentuk kompensasi finansial ini terdiri dari dua macam yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung terdiri dari pemabayaran pegawai atau karyawan dalam bentuk gaji, upah, bonus, komisi atau tunjangan. Sedangkan

kompensasi tidak langsung terdiri dari semua pembayaran yang tidak tercakup dalam kompensasi *financial* langsung yang meliputi liburan, berbagai macam asuransi, jasa seperti perawatan anak atau kepedulian keagamaan dan sebagainya.

b. Kompensasi yang bersifat non-keuangan (*non-financial*)

Bentuk kompensasi non-finansial ini berupa pujian, menghargai diri sendiri, promosi jabatan dan pengakuan yang mempengaruhi motivasi kerja pegawai, produktifitas dan kepuasan kerja.

3. Tujuan Kompensasi

Tujuan pemberian kompensasi yang sesuai menurut Hasibuan (2008:121) adalah sebagai ikatan kerja sama, kepuasan kerja, pengadaan yang efektif, motivasi kerja, stabilitas pegawai, disiplin serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah. Secara umum, tujuan kompensasi menurut Rivai (2010:743) adalah untuk membantu suatu organisasi mencapai keberhasilan dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Tujuan kompensasi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Memperoleh SDM yang berkualitas

Kompensasi yang cukup tinggi sangat dibutuhkan untuk memberi daya tarik kepada para pelamar. Tingkat pembayaran harus responsif terhadap standar pemberian kompensasi sehingga mendapatkan pegawai atau karyawan yang diharapkan.

2) Mempertahankan pegawai atau karyawan yang ada

Para pegawai atau karyawan yang tidak memperoleh besaran kompensasi yang tidak kompetitif dapat keluar, sehingga mengakibatkan perputaran pegawai atau karyawan yang semakin tinggi.

3) Menjamin keadilan

Kompensasi selalu berupaya agar keadilan internal dan eksternal dapat terwujud. Keadilan internal mensyaratkan bahwa pembayaran dikaitkan dengan nilai relatif sebuah pekerjaan, sehingga pekerjaan yang sama dibayar dengan besaran yang sama. Keadilan eksternal berarti pembayaran terhadap pekerja merupakan hal yang sudah sesuai dengan standar pemberian kompensasi.

4) Penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan

Pemberian kompensasi yang sesuai hendaknya memperkuat perilaku yang diinginkan dan bertindak sebagai insentif untuk perbaikan masa depan, rencana kompensasi efektif, menghargai kinerja, ketaatan, pengalaman, tanggung jawab dan perilaku-perilaku lainnya.

5) Mengendalikan biaya

Kompensasi yang rasional, membantu entitas memperoleh dan mempertahankan para pegawai dengan biaya yang beralasan.

6) Mengikuti aturan hukum

Kompensasi yang sesuai, mempertimbangkan faktor legal yang dikeluarkan pemerintah dan menjamin pemenuhan kebutuhan pegawai.

7) Memfasilitasi pengertian

Sistem manajemen kompensasi hendaknya dengan mudah dipahami oleh spesialisasi SDM, pimpinan dan para pegawai.

8) Meningkatkan efisiensi administrasi

Program pengupahan dan penggajian hendaknya dirancang untuk dapat dikelola dengan efisien dan membuat sistem SDM yang optimal.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan pelaporan keuangan, akan dijabarkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Judul (Penulis)	Variabel	Hasil penelitian
Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan tindakan kecurangan akuntansi dengan perilaku tidak etis sebagai variabel intervening (Kusumastuti, 2012)	<p>Variabel terikat (Y): Y1:Kecurangan akuntansi Y2:Perilaku tidak etis</p> <p>Variabel bebas (X): X1:Moralitas manajemen X2:Asimetri informasi X3:Ketaatan aturan akuntansi X4:Kesesuaian kompensasi X5:Keefektifan pengendalian internal.</p>	Penelitian ini menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif, sedangkan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (fraud): persepsi pegawai dinas provinsi	<p>Variabel terikat (Y): Kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>).</p> <p>Variabel bebas (X): X1:Penegakan peraturan. X2:Keefektifan</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian internal, berpengaruh negatif, sedangkan asimetri informasi berpengaruh

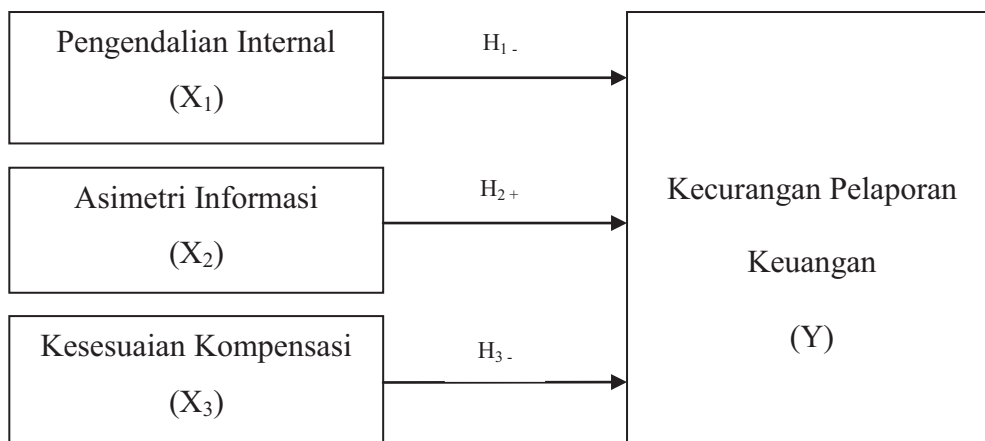
DIY.(Najahningrum, 2013)	pengendalian internal. X3:Asimetri Informasi. X4:Keadilan distributif. X5:Keadilan prosedural. X6:Komitmen organisasi. X7:Budaya etis organisasi.	positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan.
Analisis pengaruh keefektifan pengendalian internal, persepsi kesesuaian kompensasi, moralitas manajemen terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi. (Fauwzi, 2011)	<u>Variabel terikat (Y):</u> Y1:Kecenderungan kecurangan akuntansi Y2:Perilaku tidak etis <u>Variabel bebas (X):</u> X1:Keefektifan pengendalian internal. X2:Kesesuaian kompensasi X3:Moralitas Manajemen	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif, sedangkan kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan.
Analisis pengaruh sistem pengendalian internal, asimetri informasi, perilaku tidak etis dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada pemerintah daerah kabupaten lombok timur (Ahriati, Deni. dkk, 2015)	<u>Variabel terikat (Y):</u> Kecenderungan kecurangan akuntansi. <u>Variabel bebas (X):</u> X1:Sistem pengendalian internal. X2:Asimetri informasi. X3:Perilaku tidak etis X4:Kesesuaian kompensasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem pengendalian internal, asimetri informasi dan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif, sedangkan perilaku tidak etis perbengaruh positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan.
Pengaruh pengendalian internal dan kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) pada pemerintah kota palopo (Tiro, Andi Amirullah. Dkk,2014)	<u>Variabel terikat (Y):</u> Kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>). <u>Variabel bebas (X):</u> X1:Pengendalian internal. X4:Kompensasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengendalian internal dan kompensasi secara parsial berpengaruh positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan.
Pengaruh efektivitas pengendalian intern, asimetri informasi dan kesesuaian kompensasi	<u>Variabel terikat (Y):</u> Kecenderungan kecurangan akuntansi (<i>fraud</i>).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa asimetri berpengaruh positif, sedangkan

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (<i>fraud</i>) (Zainal, Rizki. 2013)	<p><u>Variabel bebas (X):</u> X1:Efektivitas pengendalian intern. X2:Asimetri informasi. X3:Kesesuaian kompensasi.</p>	efektivitas pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi perbengaruh negatif terhadap kecurangan pelaporan keuangan.
Pengaruh kesesuaian kompensasi, asimetri informasi dan moralitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi: Studi empiris pada SKPD Kota Padang (Zilmy, Rian Putra, 2013)	<p><u>Variabel terikat (Y):</u> Kecenderungan kecurangan akuntansi.</p> <p><u>Variabel bebas (X):</u> X1:Kesesuaian kompensasi X2:Asimetri Informasi X3:Moralitas</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif, sedangkan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat atau variabel dependen yaitu kecurangan pelaporan keuangan dengan variabel bebas atau variabel independen yaitu pengendalian internal, asimetri informasi dan kesesuaian kompensasi. Penelitian ini mencoba mencari kejelasan tentang pengaruh pengendalian internal, asimetri informasi dan kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan pelaporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.

Adapun kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka pemikiran

2.4 Perumusan Hipotesis

2.4.1 Hubungan Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan

Pengendalian internal memegang peranan yang sangat penting dalam meminimalisir terjadinya kecurangan. Hal ini dikarenakan pengendalian internal memberikan keyakinan yang memadai tentang tentang pencapaian tujuan keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Beberapa peneliti telah menguji pengaruh pengendalian internal terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hasil penelitian Tiro (2014) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahriati (2015) yang menemukan bahwa pengendalian internal mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap

kecurangan pelaporan keuangan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa semakin efektif pengendalian internal maka semakin kecil terjadinya kecurangan pelaporan keuangan.

H₁: Pengendalian Internal berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

2.4.2 Hubungan Asimetri Informasi Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan

Asimetri informasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini dikarenakan, tidak adanya keselarasan informasi antara pihak yang membutuhkan informasi dengan pihak yang memberikan informasi, sehingga membuat keadaan menjadi tidak seimbang. Asimetri informasi akan membuka peluang bagi pihak yang mengelola keuangan untuk melakukan kecurangan (Kusumastuti, 2012).

Beberapa peneliti telah menguji pengaruh asimetri informasi terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hasil penelitian Kusumastuti (2012) menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zilmy (2013) yang menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi asimetri informasi, peluang terjadinya kecurangan pelaporan akan semakin

meningkat. Jika asimetri informasi yang terjadi semakin kecil, maka kecurangan pelaporan keuangan akan semakin menurun.

H₂: Asimetri Informasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan

2.4.3 Hubungan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan

Kompensasi merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap tindakan dan perilaku seseorang dalam sebuah instansi. Bagi pegawai, kesesuaian kompensasi merupakan faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan. Kompensasi yang sesuai, diharapkan mampu membuat individu merasa tercukupi sehingga individu tidak melakukan tindakan yang merugikan instansi atau pemerintahan termasuk melakukan kecurangan pelaporan keuangan.

Beberapa peneliti telah menguji pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Berdasarkan penelitian Thoyibatun (2009), kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Najahningrum (2013) yang menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesesuaian kompensasi maka semakin kecil terjadinya

kecurangan pelaporan keuangan. Sebaliknya, jika kesesuaian kompensasi kecil maka terjadinya kecurangan pelaporan keuangan akan semakin besar.

H₃: Kesesuaian Kompensasi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

2.4.4 Hubungan Pengendalian Internal, Asimetri Informasi dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap kecurangan Pelaporan Keuangan

Beberapa peneliti telah menguji secara simultan mengenai pengaruh pengendalian internal, asimetri informasi dan kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Berdasarkan penelitian Prawira (2015), pengendalian internal, asimetri informasi dan kesesuaian kompensasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan.. Hal ini menunjukkan bahwa potensi adanya kecurangan pelaporan keuangan, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pengendalian internal, asimetri informasi dan kesesuaian kompensasi.

H₄: Pengendalian Internal, Asimetri Informasi dan Kesesuaian Kompensasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan